

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex S. Nitisemito. 2000. Manajemen Personalia: Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anoraga, Panji. 2010. Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 2008. Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2005. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmawi, Herman. 2012. Manajemen Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan S.P, Malayu. 2008. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Grafindo.
- Husni Mubarak Muhammad. 2009. Manajemen Strategi. Kudus: STAIN Kudus.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default & Cross Collateral* dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jatmiko,RD. 2003. Manajemen Strategik. Malang: Uum Press.

- Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2013. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotler dan Armstrong. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: BPFE.
- Manullang, Marihot. 2006. Manajemen Personalia. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Mardiana dan Sri handayani. 2017. Eksistensi Perum Jaminankredit Indonesia (Jamkrindo) Sebagai Penjamin Kredit Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Palembang. Simbur cahaya, vol XXIV : 4921 - 4932.
- Mayuni dan Rustariyuni. 2015. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kinerja Umkm Di Kabupaten Jembrana. E-jurnal EP Unud, 4 (12) : 1489 - 1506.
- Nawawi. 2003. Manajamen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Rachmadi Usman. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang. 2005. Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susilo, Y. Sri. 2010. Peran Perbankan Dalam Pembiayaan Umkm. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, vol 14 : 467 - 478.

Suwandyanto, M. 2010. Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

Tambunan, Tulus. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting. Jakarta: PT Salemba Empat.

Tambunan, Tulus. 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Isu-isu Penting. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang No 01 Tahun 2016 Pasal 39 Tentang Mekanisme Pola Penjaminan

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) "lembaga penjaminan" (Diunduh 13 Desember 2018)



Lampiran 1 : Lembar Persetujuan

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui dosen pembimbing dan layak untuk di uji:

Tanggal : 22 Juli 2019

Dosen Pembimbing,



Dra. Siti Istikhoroh, M.Si

NIP : 19671019.199203.2.001

**MATRIK PENELITIAN KUALITATIF**

**NAMA : ESTININGTYAS PUTRI PALUPI**

**NIM : 151600097**

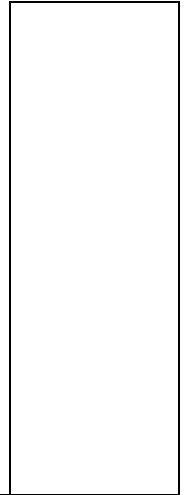
**JUDUL : PERAN PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PERBANKAN PADA SEKTOR UMKM DI SURABAYA**

PERMASALAHAN	KONSEP	SUBJEK PENELITIAN	OBJEK PENELITIAN	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE ANALISIS DATA	DAFTAR PUSTAKA
Bagaimanakah peran Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan perbankan pada sektor UMKM di Surabaya ?	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia	Pembiayaan Perbankan pada Sektor UMKM	1. Wawancara	1. Analisis Domain	PP RI No 35 Tahun 2018
				2. Dokumentasi	2. Analisis Taksonomi	
					3. Analisis Komponen sial	UU No 1 Tahun 2016
					4. Analisis Tema Kultural	Umboh,T.E .K., Nangoi,

**undang Nomor  
19 Tahun 2003  
tentang Badan  
Usaha Milik  
Negara yang  
seluruh  
modalnya  
dimiliki  
negara berupa  
kekayaan  
negara yang  
dipisahkan  
dan tidak  
terbagi atas  
saham yang  
menyelengar  
akan usaha  
penjaminan  
bagi usaha  
Mikro, Usaha  
Kecil, dan  
Usaha  
Menengah,**

**G.B.,  
Wokas,  
H.R.N.  
(2018)  
Analisis  
Efektivitas  
Penjaminan  
Kredit  
Usaha  
Rakyat  
Pada  
Perum  
Jamkrindo  
Kantor  
Cabang  
Manado**

**serta Koperasi  
dan usaha  
lainnya yang  
dapat  
menunjang  
tercapainya  
maksud dan  
tujuan  
Perusahaan  
Umum  
Jaminan Kredit  
Indonesia.**





<p><b>Peran Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau biasa disebut Perum Jamkrindo ialah memberikan penjaminan kredit bagi UMKM agar dapat mengakses dan memperoleh pendanaan dari pemerintah melalui perbankan.</b></p>					
---	--	--	--	--	--

**Pembiayaan  
adalah  
penyediaan  
dana oleh  
Pemerintah,  
Pemerintah  
Daerah, Dunia  
Usaha, dan  
masyarakat  
melalui bank,  
koperasi, dan  
lembaga  
keuangan  
bukan bank,  
untuk  
mengembang-  
kan dan  
memperkuat  
permodalan  
Usaha Mikro,  
Kecil, dan  
Menengah.  
Usaha Mikro,**

<p><b>Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhka n dan mengembangk an usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.</b></p>					
---	--	--	--	--	--

	<p><b>Kredit Usaha Rakyat adalah pemberian modal kerja dan investasi yang diberikan kepada UMKM-K dengan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.</b></p>					
	<p><b>Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan yang berarti bank akan memberikan kredit jika bank yakin</b></p>					

bahwa calon debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.					
---	--	--	--	--	--

Dosen Pembimbing,



Dra. Siti Istikhoroh, M.Si

---

196710191992032000

Surabaya, 25 Oktober 2018

Peneliti/Mahasiswa



Estiningtyas Putri Palupi












---

151600097

## Lampiran 3


### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Estiningtyas Putri Palupi
2. NIM : 151600097
3. Program Studi : Akuntansi
4. Tanggal Mengajukan : 19 Oktober 2018
5. Judul Skripsi : Peran Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Dalam Meningkatkan Pembiayaan Perbankan Pada Sektor UMKM Di Surabaya
6. Dosen Pembimbing : Dra. Siti Istikhoroh, M.Si.
7. Konsultasi :

No	Tanggal	Paraf Bimbingan	Uraian/Kegiatan
1.	19/11/18		Judul + Matrik, Revisi
2.	25/11/18		Judul + Matrik, Acc
3.	14/12/18		Penelitian Terdahulu, Acc
4.	20/12/18		Proposal, Revisi
5.	27/12/18		Proposal, Revisi
6.	22/01/19		Proposal, Acc
7.	10/04/19		Instrumen, Revisi
8.	09/05/19		Instrumen, Revisi
9.	13/05/19		Instrumen, Acc
10.	10/07/19		Bab IV - V, Revisi
11.	18/07/19		Bab IV - V + Artikel, Revisi
12.	22/07/19		Bab IV - V + Artikel, Acc

8. Tanggal selesai menulis skripsi : 22 Juli 2019

Surabaya, 23 Juli 2019  
Dosen Pembimbing,

  
Dra. Siti Istikhoroh. M.Si  
NIP : 19671019.199203.2.001

## Lampiran 4 : Daftar Hadir Peserta Sempro



**UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Jl. Dukuh Menanggal XII/4, Telp-Fax. 031-8281183 Surabaya 60234  
 Website: <http://www.fe.unipasby.ac.id>

### DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL

Judul : Peran Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Dalam Meningkatkan Pembiayaan Perbankan Pada Sektor UMKM Di Surabaya

Nama : Estiningtyas Putri Palupi

Nim : 15-160-0097

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Angkatan : 2015

Hari, Tanggal : Kamis, 29 Januari 2019

Tempat : Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Dosen Pembimbing : Dra. Siti Istikhoroh, M.Si.

No	NIM	NAMA	PRODI	Tanda Tangan
1.	15.160.0295	Dawni Retno	Akuntansi	
2.	15-160-0150	M. Erwan I	Akuntansi	
3.	15.160.0001	Septiana Tri P	Akuntansi	Sp.
4.	15.160.0042	Rena Noviana	Akuntansi	
5.	15-160-0089	Nanda Indah	Akuntansi	
6.	15.160.0203	Davi Puspita	Akuntansi	
7.	15.160.0071	Septi Nur	Akuntansi	
8.	151600218	Laura ardy	Akuntansi	
9.	151600059	Fitri Rifatul.	Akuntansi	
10.	151500005	A.FACHRUL R	MANAJEMEN	
11.	151500152	REZA ARDIANSYAH	MANAJEMEN	
12.	15.160.0098	Satriya Teguh	Akuntansi	
13.	151600086	Harisma W	Akuntansi	
14.	151500097	Winda Rizka	Manajemen	






UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Dukuh Menanggal XII/4, Telp-Fax. 031-8281183 Surabaya 60234


Website: <http://www.fe.unipasby.ac.id>

16.	Erina Sari	151600226	Akuntansi		Amisaf.
17.	Nanang	151600205	Akuntansi	Amf.	
18.	Lailatul	151600191	Akuntansi		Pauland.
19.	Siti Kusnita	151600077	Akuntansi	Kusuf.	
20.	Netty Irma	151600190	Akuntansi		Jrmf.
21.	Mediana	151600237	Akuntansi	Megaw	
22.	Siti Rokhman	151600236	Akuntansi		Surobo
23.	Hermin A	151600131	Akuntansi		
24.	Ina Laila	151600174	Akuntansi		Imang.
25.	Atika R.	151500218	Manajemen	Amuf.	
26.	Astri Wibha	151600212	Akuntansi		Asuf.
27.	Aryanti	151600149	Akuntansi	Amuf.	
28.	Dini Tapsia	151600178	Akuntansi	Ami	
29.	Ruput Y	151600191	Akuntansi		
30.	Murul L	151600169	Akuntansi		Amuf.

Dosen Pembimbing,

  
Dra. Siti Istikhoro. M.Si  
NIP : 19671019.199203.2.001

Mahasiswa,

  
Estiningtyas Putri Palupi  
151600097

Lampiran 5 : Berita Acara Bimbingan Revisi Skripsi



**UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus : Jl. Dukuh Menanggal XII/4, Telp-Fax. 031-8281183  
Surabaya 60234

Website : <http://www.unipasby.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN REVISI SKRIPSI**

Nama : Estiningtyas Putri Palupi  
NIM / Program Studi : 151600097 / Akuntansi  
Judul Skripsi : Peran Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Dalam Meningkatkan Pembiayaan Perbankan Pada Sektor UMKM Di Surabaya  
Tanggal Ujian Skripsi : 29 Juli 2019  
Penguji : 1. Dr. Aji Prasetyo, SEL., MSA  
2. Drs. I Ketut Surabagiarta, S.E., M.M.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Penguji I	Paraf Penguji II
1	5 Agustus 2019	Data Real/Empiris		
2	5 Agustus 2019	Consensus UMKM		
3	5 Agustus 2019	Rancangan Penelitian		
4	5 Agustus 2019	Simpulan		
5	5 Agustus 2019	Manfaat Penelitian		
6	6 Agustus 2019	Daftar Isi		

Surabaya, 6 Agustus 2019

Penguji I,

Dr. Aji Prasetyo, SEL., MSA  
NPP 1507730/DY

Penguji II,

Drs. I Ketut Surabagiarta, S.E., M.M.  
NPP 1701834/DY

## Lampiran 6



Nomor : 317/W.6.V/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Surabaya, 31 Mei 2019

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**Universitas PGRI Adi Buana**  
**Surabaya**  
di SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Loesdarwanto  
Jabatan : Pimpinan Wilayah  
Perusahaan : Perum Jamkrindo  
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2-3 Surabaya

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Estiningtyas Putri Palupi  
NIM : 151600097  
Fak./Jurusan : Ekonomi / Akuntansi  
Universitas : Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul **PERAN PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PERBANKAN PADA SEKTOR UMKM DI SURABAYA** pada tanggal 31 Mei 2019.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  
JAMINAN KREDIT INDONESIA**

14 Kantor Wilayah VI Surabaya



Jamkrindo

**Loesdarwanto**  
Pemimpin Wilayah

## Lampiran 7

Nara Sumber : Arya Wicaksono Kurniawan

Jabatan : Kepala Bagian Bisnis Penjaminan Kanwil VI  
Surabaya

1. Bagaimana mekanisme penjaminan pada Perum Jamkrindo ?
  - Mekanisme Jamkrindo ada dua pola yaitu langsung dan tidak langsung. pada intinya Jamkrindo adalah sebagai pengganti agunan yang kurang untuk membantu usaha yang layak namun tidak memiliki agunan sesuai persyaratan pihak bank.
2. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penjaminan UMKM ?
  - Pihak yang terkait adalah pihak nasabah, perbankan, dan Jamkrindo
3. Bagaimana kedudukan pihak terkait dalam proses penjaminan ?
  - Kedudukannya adalah bank sebagai penerima jaminan, nasabah atau UMKM sebagai terjamin, dan Jamkrindo sebagai penjamin.
4. Apakah pihak UMKM sebagai terjamin mengetahui keberadaan Perum Jamkrindo sebagai pemberi jaminan ?
  - Untuk penjaminan UMKM pola yang digunakan adalah pola tidak langsung jadi keberadaan Jamkrindo tidak diketahui untuk menghindari moral hazard.
5. Bagaimana tata cara pengajuan penjaminan ?
  - Untuk kredit produktif seperti UMKM, mereka datang ke bank, bank menganalisa kelayakan usaha mereka, setelah dianalisa komite perbankan, bank menetapkan

berapa yang layak untuk dibiayai baru setelah putusan kredit cair atau akad kredit, debitur mendapatkan kredit baru perbankan mengurus penjaminan ke Jamkrindo.

6. Apakah pihak UMKM masih harus memberikan agunan yang dimiliki ?
  - Pihak UMKM masih harus memberikan agunan yang mereka miliki, karena Jamkrindo hanya mengcover sisa agunan agar usaha ini bankable
7. Apabila masih ada agunan yang diberikan pihak UMKM dan terjadi kredit macet, bagaimana pembagian pencairan agunan antara pihak bank sebagai pihak penerima jaminan dan Jamkrindo sebagai penjamin ?
  - Sesuai dengan proporsi penjaminannya. Jamkrindo mendapat bagian sesuai dengan cover penjaminan yang diberikan.
8. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban Jamkrindo sebagai pihak penjamin dalam mengatasi kredit macet pada UMKM ?
  - Sesuai dengan prosedur PKS, sudah menjadi tanggung jawab Jamkrindo membayarkan klaim sebesar apa yang disepakati ketika kredit dinyatakan macet collect 4. Jadi pertanggung jawaban yang diberikan yaitu dalam bentuk pembayaran klaim.
9. Berapa besar persentase jumlah penjaminan yang diberikan Perum Jamkrindo pada tiap perjanjian penjaminannya ?
  - Besar persentase tiap penjaminan berbeda beda sesuai dengan kebutuhan terjamin. Nilai maksimal penjaminan Jamkrindo untuk UMKM sebesar 75%

10. Bagaimana prosedur pengajuan klaim atas kredit macet ?
- Ketika kredit macet memasuki collect 4 maka hak klaim bank terhadap Jamkrindo telah keluar. Pihak bank bisa mengajukan klaim dengan memenuhi dokumen yang di syaratkan kemudian Jamkrindo akan memberi putusan setelah 15 hari kerja.
11. Apabila kredit macet telah terbayar bagaimana proses pengembalian biaya penjaminan yang diberikan Perum Jamkrindo ?
- Setelah Jamkrindo membayarkan klaim kepada bank, hal itu diselesaikan hanya untuk kepentingan banknya. Outstanding di bank nasabah masih ada kewajiban. Kewajiban nasabah beralih, dahulu debitur kepada bank, karena Jamkrindo telah membayarkan klaim maka kewajibannya beralih kepada Jamkrindo, ini yang dinamakan subrogasi.
12. Apa saja ketentuan dan persyaratan dari Perum Jamkrindo untuk usaha yang akan diberikan penjaminan ?
- Untuk ketentuan UMKM yang dapat dijamin Jamkrindo adalah sesuai dengan ketentuan kementerian yaitu batasan-batasan UMKM. Untuk syarat ada dokumen-dokumen umum yang harus dipenuhi, juga usaha yang layak dalam artian usaha yang produktif.
13. Bagaimana upaya Perum Jamkrindo dalam meyakinkan pihak perbankan untuk bekerjasama dengan Perum Jamkrindo ?
- Upaya yang dilakukan Jamkrindo dengan cara selalu konsisten memperbaiki kinerja perusahaan karena pihak perbankan akan melihat bagaimana kinerja Jamkrindo,

selain itu dengan cara marketing yaitu mengenalkan produk Jamkrindo, menjelaskan keuntungan yang didapat apabila bekerjasama dengan Jamkrindo, kemudian dengan cara silaturahmi membangun pendekatan secara formal maupun informal.

**14. Bagaimana ketentuan-ketentuan dalam bekerjasama dengan Perum Jamkrindo ?**

- Ketentuan untuk lembaga keuangan Bank tentunya yang diakui OJK, untuk lembaga keuangan non bank ada parameter tingkat kesehatan dan juga parameter mekanisme pengelolaan pembiayaannya.

**15. Hingga tahun 2019 ini berapa banyak mitra perbankan yang bekerjasama dengan Jamkrindo ?**

- Seluruh Bank BUMN, Bank swasta ada beberapa sekitar dua puluh lebih, Seluruh Bank BUMD. Hampir seluruh Bank yang terdaftar di OJK bekerjasama dengan Jamkrindo.

**Nara Sumber : Dedi Wardani**

**Jabatan : Staf Fungsional MSDM Perum Jamkrindo  
Kanwil VI Surabaya.**

1. **Bagaimana mekanisme penjaminan pada Perum Jamkrindo ?**
  - **Mekanisme penjaminan Perum Jamkrindo ada dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung dimana pada kedua cara tersebut penjaminan sebagai pelengkap apabila suatu usaha itu layak dibiayai namun tidak memenuhi syarat perbankan berupa agunan yang cukup. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penjaminan UMKM ?**
  
2. **Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penjaminan UMKM ?**
  - **Pihak yang terkait ada Debitur, Kreditur, dan Perusahaan penjamin**
  
3. **Bagaimana kedudukan pihak terkait dalam proses penjaminan ?**
  - **Jamkrindo sebagai Penjamin, UMKM sebagai pihak yang dijamin, perbankan sebagai penerima jaminan dari Jamkrindo.**
  
4. **Apakah pihak UMKM sebagai terjamin mengetahui keberadaan Perum Jamkrindo sebagai pemberi jaminan ?**
  - **Sesuai dengan mekanisme Bank yaitu silent basis artinya mitigasi resiko yang tersendiri tanpa sepengetahuan debitur untuk melakukan langkah-langkah pengamanan dalam rangka realisasi pembiayaan terhadap UMKM. Jadi keberadaan Jamkrindo tidak diketahui pihak nasabah sebagai penjamin atas resiko kredit macet.**



5. Bagaimana tata cara pengajuan penjaminan ?
  - Pihak debitur atau UMKM bisa mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak kreditur atau bank, melengkapi persyaratan yang ditetapkan perbankan, bank menganalisa coverage usahanya dan menetapkan biaya pembiayaan, bank mengajukan penjaminan kepada Jamkrindo, Jamkrindo menganalisa berapa besar penjaminan sesuai dengan nilai pinjamannya.
  
6. Apakah pihak UMKM masih harus memberikan agunan yang dimiliki ?
  - Untuk produk penjaminan UMKM, nilai maksimal penjaminan Jamkrindo sesuai SOP adalah 75% untuk mitigasi resiko agar mencapai angka bankable maka bank harus mengambil langkah untuk cover resiko yang 25%, angka 25% ini biasa diambil pihak bank melalui agunan yang diberikan debitur
  
7. Apabila masih ada agunan yang diberikan pihak UMKM dan terjadi kredit macet, bagaimana pembagian pencairan agunan antara pihak bank sebagai pihak penerima jaminan dan Jamkrindo sebagai penjamin ?
  - Untuk pembagian agunan sifatnya adalah rekapitulasi yaitu sebesar nilai kerugian atau nilai yang dibayarkan Jamkrindo.
  
8. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban Jamkrindo sebagai pihak penjamin dalam mengatasi kredit macet pada UMKM ?

- Bentuk pertanggung jawabannya adalah dengan pembayaran klaim atau biaya kerugian yang diderita bank selama kredit macet.
9. Berapa besar persentase jumlah penjaminan yang diberikan Perum Jamkrindo pada tiap perjanjian penjaminannya ?
- Di dalam ketentuan SOP Jamkrindo nilai maksimal penjaminan adalah 75%. Untuk persentase penjaminan bervariasi tergantung berapa besar yang dibutuhkan perbankan untuk mengcover resiko kerugian.
10. Bagaimana prosedur pengajuan klaim atas kredit macet ?
- Pengajuan Klaim telah diatur dalam POJK no.02 tahun 2017. Saat terjamin melakukan wanprestasi terhadap kewajiban finansialnya bank melaporkan kerugiannya dalam sliK OJK, membuat berita acara klaim, menyampaikan legalitas kredit nyata kepada Jamkrindo, maka Jamkrindo akan memberi putusan klaim saat 15 hari kerja.
11. Apabila kredit macet telah terbayar bagaimana proses pengembalian biaya penjaminan yang diberikan Perum Jamkrindo ?
- Ketika terjamin kembali mampu melakukan angsuran karena membaiknya usaha maka pengembalian dana talangan yang dibayarkan Jamkrindo atau biaya klaim sesuai dengan cover penjaminan. Pengembalian dana ini dinamakan Subrogasi.
12. Apa saja ketentuan dan persyaratan dari Perum Jamkrindo untuk usaha yang akan diberikan penjaminan ?

- Mengacu pada Undang-undang tentang kriteria UMKM, dimana batasannya adalah usaha menengah yaitu yang memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari 10 M tidak termasuk tanah dan bangunan. Selain itu usaha yang sehat dan layak untuk dibiayai.
13. Bagaimana upaya Perum Jamkrindo dalam meyakinkan pihak perbankan untuk bekerjasama dengan Perum Jamkrindo ?
- Upaya yang dilakukan dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Secara bisnis dengan menjelaskan bahwa perusahaan Jamkrindo ini secara legal formal merupakan perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia, menjelaskan benefit yang akan didapat dalam bekerjasama dengan Jamkrindo.
14. Bagaimana ketentuan-ketentuan dalam bekerjasama dengan Perum Jamkrindo ?
- Ketentuannya tentunya harus lembaga keuangan yang menyalurkan kredit dan lembaga keuangan ini terdaftar di OJK.
15. Hingga tahun 2019 ini berapa banyak mitra perbankan yang bekerjasama dengan Jamkrindo ?
- Mitra perbankan Jamkrindo adalah seluruh Bank BUMN, kemudian seluruh Bank BUMD, ada 26 Bank BPD, dan 25 Bank swasta.

**Nara Sumber : Hendra Hermawan**

**Jabatan : Kepala bagian Bisnis Klaim dan Subrogasi  
Perum Jamkrindo Kanwil VI Surabaya.**

1. **Bagaimana mekanisme penjaminan pada Perum Jamkrindo ?**
  - **Mekanisme penjaminan pada Perum Jamkrindo disini istilahnya adalah agunan tambahan bagi usaha yang feasible namun tidak bankable. Ada dua pola penjaminan pada Perum Jamkrindo, yaitu langsung kepada Jamkrindo dan tidak langsung yaitu melalui bank.**
  
2. **Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penjaminan UMKM ?**
  - **Ada tiga pihak yaitu Debitur, Kreditur, dan Jamkrindo**
  
3. **Bagaimana kedudukan pihak terkait dalam proses penjaminan ?**
  - **Kedudukan Jamkrindo disini sebagai pihak ketiga yaitu pemberi jaminan, pihak bank sebagai penerima jaminan, dan UMKM sebagai terjamin.**
  
4. **Apakah pihak UMKM sebagai terjamin mengetahui keberadaan Perum Jamkrindo sebagai pemberi jaminan ?**
  - **Selama penjaminan terhadap UMKM keberadaan Jamkrindo tidak diketahui oleh UMKM, hanya pihak perbankan saja yang tahu akan keberadaan Jamkrindo. Hal ini juga untuk menghindari kelalaian UMKM sebagai debitur dalam mengangsur kreditnya.**
  
5. **Bagaimana tata cara pengajuan penjaminan ?**

- Untuk UMKM bisa mengajukan permohonan pembiayaan ke perbankan, melengkapi administrasi sesuai ketentuan bank, lalu pihak bank mengajukan penjaminan kepada Jamkrindo.
6. Apakah pihak UMKM masih harus memberikan agunan yang dimiliki ?
    - Jamkrindo hanya sebagai pelengkap agunan usaha yang dianggap kurang oleh bank, jadi agunan harus tetap diberikan sebagai pengikat untuk menjaga itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.
  7. Apabila masih ada agunan yang diberikan pihak UMKM dan terjadi kredit macet, bagaimana pembagian pencairan agunan antara pihak bank sebagai pihak penerima jaminan dan Jamkrindo sebagai penjamin ?
    - Pembagian agunan secara proposional tergantung seberapa besar coverage yang disepakati untuk dijamin.
  8. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban Jamkrindo sebagai pihak penjamin dalam mengatasi kredit macet pada UMKM ?
    - Jamkrindo membayarkan uang kerugian bank saat kredit macet terjadi, uang kerugian itu biasa disebut biaya klaim.
  9. Berapa besar persentase jumlah penjaminan yang diberikan Perum Jamkrindo pada tiap perjanjian penjaminannya ?
    - Disesuaikan dengan permintaan perbankan, tergantung besarnya nilai agunan yang kurang.
  10. Bagaimana prosedur pengajuan klaim atas kredit macet ?

- Sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disebutkan dengan beberapa persyaratan dokumen, klaim bisa diajukan pada saat kondisi debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya, atau sesuai ketentuan BI yaitu pada collect 4. Setelah dokumen dilengkapi bank bisa mengajukan klaim dan akan diputusi Jamkrindo pada saat 15 hari kerja.
11. Apabila kredit macet telah terbayar bagaimana proses pengembalian biaya penjaminan yang diberikan Perum Jamkrindo ?
- Setelah klaim dibayar kepada bank, pembiayaan beralih menjadi piutang subrogasi Jamkrindo. Jadi apabila nasabah kembali membayarkan kewajibannya maka itu menjadi hak Jamkrindo sesuai dengan jumlah pembayaran klaim.
12. Apa saja ketentuan dan persyaratan dari Perum Jamkrindo untuk usaha yang akan diberikan penjaminan ?
- Ketentuan dan syarat sudah ada pada perjanjian kerjasama, salah satunya adalah usaha minimal sudah berjalan selama enam bulan, selanjutnya untuk UMKM Jamkrindo menyesuaikan dengan Peraturan pemerintah mengenai batasan-batasan usaha yang bisa disebut UMKM.
13. Bagaimana upaya Perum Jamkrindo dalam meyakinkan pihak perbankan untuk bekerjasama dengan Perum Jamkrindo ?
- Dilihat dari sisi gearing ratio yaitu kemampuan perusahaan penjaminan menjamin kegagalan finansial terjamin atas kewajibannya, gearing ratio Jamkrindo

masih terjaga dan diupayakan selalu mengalami peningkatan agar dapat menjaga kepercayaan mitra kerja. Selain itu dengan upaya marketing, melakukan promosi atas produk-produk keluaran Jamkrindo.

14. Bagaimana ketentuan-ketentuan dalam bekerjasama dengan Perum Jamkrindo ?

- Ketentuan kerjasama Jamkrindo dengan Bank telah diatur oleh OJK, jadi dalam bekerjasama menyesuaikan dengan spesifikasi yang telah ditentukan OJK.

15. Hingga tahun 2019 ini berapa banyak mitra perbankan yang bekerjasama dengan Jamkrindo ?

- Seluruh Bank BUMN dan BUMD, beberapa Bank swasta.



## PIHAK-PIHAK DALAM PENJAMINAN



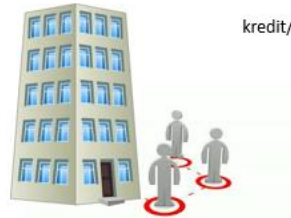
### Terjamin

Pihak yang memperoleh kredit/pembiayaan dari kreditur baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, koperasi atau UMKM (Debitur).



### Penerima Jaminan

Bank atau lembaga keuangan atau Badan Usaha Lain yang memberikan kredit/pembiayaan kepada Terjamin (kreditur)



### Penjamin

Adalah perusahaan Penjaminan Kredit



TERPERCAYA RESPONSIF UNGGUL SEHAT TERKEMUKA

Pihak-pihak Dalam Penjaminan

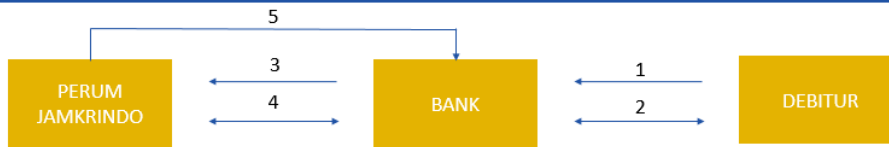




No	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Max 50 Jt	Max 300 jt
2	USAHA KECIL	> 50 jt - 500 jt	> 300 jt - 2,5 M
3	USAHA MENENGAH	> 500 jt - 10 M	> 2,5 M - 50 M

Kriteria UMKM

### TATA CARA PENGAJUAN PENJAMINAN



1. Calon TERJAMIN mengajukan permohonan kredit kepada PENERIMA JAMINAN
2. PENERIMA JAMINAN menilai kelayakan kredit TERJAMIN dan akad kredit
3. PENERIMA JAMINAN mengajukan Penjaminan secara tertulis kepada PENJAMIN dengan melampirkan :
  - Daftar TERJAMIN
  - Bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP)
4. PENJAMIN melakukan verifikasi pengajuan dan pembayaran IJP
5. PENJAMIN melakukan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) dan menyampaikan SP kepada PENERIMA JAMINAN



*Your TRUSTed Guarantee Partner*

**Tata Cara Pengajuan Penjaminan**



REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT PENJAMINAN PER PENERIMA JAMINAN KONVENSIONAL - SYARIAH

KANTOR WILAYAH : KANWIL 6 (SURABAYA)  
TANGGAL CETAK : 31-Jul-2019  
PERIODE : 01-01-2018 s/d 31-12-2018  
PERIODE PERUBAHAN DATA : Juli 2019  
PENJAMINAN : TIDAK DIKALI OR

NO.	PENERIMA JAMINAN	WILAYAH KERJA	SP/SK	NASABAH	TENAGA KERJA	POKOK KREDIT/ PEMBIAYAAN (Rp.)	PENJAMINAN (Rp.)	IJP/IJK (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,	BANK BUKOPIN	Surabaya	3	3	0	640.370.375	640.370.375	5.835.996
2,	BANK BUKOPIN	Malang	3	3	0	19.995.000.000	19.995.000.000	227.443.125
3,	BANK BUKOPIN	Madiun	1	1	0	2.536.632.832	1.902.474.624	23.463.854
4,	BANK MANDIRI	Surabaya	1.850	14.844	14.148	932.732.758.325	694.355.148.910	25.890.230.526

5,	BANK MANDIRI	Malang	223	1.771	1.701	134.225.345.198	104.302.595.198	3.562.206.066
6,	BANK MANDIRI	Madiun	229	2.447	2.428	155.710.895.549	109.380.005.549	4.766.304.274
7,	BANK MANDIRI	Kediri	108	1.137	1.137	61.655.800.000	43.159.060.000	1.859.122.580
8,	BANK MANDIRI	Banyuwangi	56	434	434	23.904.300.000	16.733.010.000	732.763.219
9,	BANK NEGARA INDONESIA	Surabaya	450	6.613	12.410	358.364.962.671	279.336.328.914	8.062.455.863
10,	BANK NEGARA INDONESIA	Malang	140	159	81	32.292.497.984	31.445.997.984	346.146.524
11,	BANK NEGARA INDONESIA	Madiun	29	778	1.546	71.024.282.824	49.716.997.977	1.842.097.749
12,	BANK NEGARA INDONESIA	Kediri	62	649	1.312	151.719.057.264	106.203.340.085	5.592.463.092
13,	BANK NEGARA INDONESIA	Banyuwangi	30	1.630	3.252	46.772.616.590	32.871.232.958	1.248.437.924
14,	BANK RAKYAT INDONESIA	Surabaya	9.413	166.820	6.733.276	3.087.331.655.435	2.245.347.327.203	67.995.267.687
15,	BANK RAKYAT INDONESIA	Malang	3.156	57.636	16.678.537	1.054.941.082.532	760.738.076.772	24.411.555.017
16,	BANK RAKYAT INDONESIA	Madiun	1.648	56.136	1.584.509	1.011.961.053.192	716.614.397.234	27.254.118.050
17,	BANK RAKYAT INDONESIA	Kediri	2.955	98.998	9.395.461	1.747.982.798.521	1.218.100.858.965	39.952.154.342
18,	BANK RAKYAT INDONESIA	Banyuwangi	1.066	25.184	283.113	482.343.534.592	339.232.543.135	9.686.595.038
19,	BANK TABUNGAN NEGARA	Surabaya	228	7.907	13	809.234.127.734	808.905.627.734	7.881.918.704

20,	BANK TABUNGAN NEGARA	Malang	3	3	13	1.465.000.000	1.025.500.000	65.962.500
21,	BANK TABUNGAN NEGARA	Madiun	8	50	0	5.484.468.072	5.484.468.072	85.739.450
22,	BANK TABUNGAN NEGARA	Banyuwangi	23	2.656	0	291.793.588.584	291.793.588.584	3.887.733.207
23,	BPD JATIM	Surabaya	2.309	11.155	0	864.485.009.260	807.420.457.830	11.302.350.337
24,	BPD JATIM	Malang	663	1.581	0	100.735.638.391	99.581.910.841	1.574.359.607
25,	BPD JATIM	Madiun	347	1.159	0	84.648.347.079	83.165.847.079	1.252.022.926
26,	BPD JATIM	Kediri	300	1.377	0	90.642.317.682	90.387.817.682	1.059.355.179
27,	BPD JATIM	Banyuwangi	118	247	0	29.225.560.232	25.295.812.314	482.728.582
28,	BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur	Surabaya	6	114	0	4.835.000.000	4.835.000.000	107.840.000
29,	BPR Jombang	Kediri	1	4.917	0	97.148.622.695	97.148.622.695	1.277.473.052
30,	KOPERASI PEGAWAI	Surabaya	37	2.776	0	143.315.400.000	143.315.400.000	2.609.754.150
31,	OBLIGEE CUSTOMS BOND	Surabaya	14	12	0	3.000.000.000	3.000.000.000	34.500.000
32,	OBLIGEE CUSTOMS BOND	Banyuwangi	2	2	0	580.344.250	580.344.250	1.741.034
33,	OBLIGEE SURETY	Surabaya	6.324	6.217	0	317.604.672.071	317.604.672.071	1.430.436.904

34,	OBLIGEE SURETY	Malang	3.413	3.387	0	191.862.242.493	191.862.242.493	735.152.738
35,	OBLIGEE SURETY	Madiun	829	812	0	26.912.870.475	26.912.870.475	116.736.621
36,	OBLIGEE SURETY	Kediri	599	599	0	22.709.157.595	22.709.157.595	88.044.442
37,	OBLIGEE SURETY	Banyuwangi	771	770	0	17.093.641.038	17.093.641.038	87.092.180
38,	PERMODALAN NASIONAL MADANI	Madiun	5	6	0	488.700.000	488.700.000	0
39,	PT. BRI AGRONIAGA TBK	Surabaya	28	864	0	10.088.000.000	10.088.000.000	173.095.000
40,	PT. PEGADAIAN (PERSERO)	Surabaya	1.707	3.891	0	91.314.700.000	91.314.700.000	1.396.135.671
41,	PT. PEGADAIAN (PERSERO)	Malang	550	1.433	0	35.150.600.000	35.150.600.000	575.157.388
42,	PT. PEGADAIAN (PERSERO)	Madiun	613	2.094	0	45.545.500.000	45.545.500.000	715.553.305
43,	PT. PEGADAIAN (PERSERO)	Kediri	704	2.802	0	49.275.300.000	49.275.300.000	747.608.057
44,	PT. PEGADAIAN (PERSERO)	Banyuwangi	457	1.459	0	38.779.400.000	38.779.400.000	650.872.361
45,	PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH	Surabaya	591	1.533	0	37.577.500.000	37.577.500.000	606.677.803
46,	PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH	Malang	62	127	0	4.201.600.000	4.201.600.000	70.376.146

47,	PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH	Madiun	6	10	0	528.000.000	528.000.000	10.008.200
48,	PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH	Kediri	19	109	0	1.566.500.000	1.566.500.000	27.944.999
49,	PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH	Banyuwangi	11	42	0	873.500.000	873.500.000	15.897.410
JUMLAH			42.170	495.354	34.713.371	12.794.299.951.533	10.123.587.046.636	262.528.928.881
T O T A L			42.170	495.354	34.713.371	12.794.299.951.533	10.123.587.046.636	262.528.928.881



## Lampiran 10 : Surat Keterangan Penelitian

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Bagus D., SE., MM.  
Jabatan : Kepala Lab. Kewirausahaan

Menyatakan bahwa :

Nama : Estiningtyas Putri Palupi  
NIM : 151600097  
Prodi : Akuntansi

telah melakukan uji plagiasi dengan judul artikel Peran Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Dalam Meningkatkan Pembiayaan Perbankan Pada Sektor Umkm Di Surabaya, dengan hasil 8,71 % Similarities.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Kepala Laboratorium,



I Made Bagus D., SE., MM.